

Prodi Administrasi Publik

Jurnal Nia agus saputri

 Jurnal Nia agus saputri
 Fisip
 Universitas Abdurachman Saleh

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3335628296****Submission Date****Sep 11, 2025, 2:30 AM UTC****Download Date****Sep 11, 2025, 2:53 AM UTC****File Name****Jurnal_Nia_agus_saputri.pdf****File Size****303.8 KB****17 Pages****7,180 Words****47,651 Characters**

22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 27 words)

Exclusions

- 50 Excluded Sources

Top Sources

- 21%  Internet sources
- 9%  Publications
- 15%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

21% Internet sources
 9% Publications
 15% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	deyananurfitriani.blogspot.com	1%
2	Internet	www.unars.ac.id	1%
3	Student papers	Universitas Respati Indonesia	<1%
4	Internet	adoc.pub	<1%
5	Student papers	Badan PPSPM Kesehatan Kementerian Kesehatan	<1%
6	Internet	repository.poltekkes-denpasar.ac.id	<1%
7	Internet	jimfeb.ub.ac.id	<1%
8	Internet	journal.ipb.ac.id	<1%
9	Internet	stialan.ac.id	<1%
10	Internet	www.coursehero.com	<1%
11	Internet	jurnal.uimedan.ac.id	<1%

12	Internet	repositori.uin-alaudidin.ac.id	<1%
13	Internet	www.scribd.com	<1%
14	Internet	liputan4.com	<1%
15	Student papers	Universitas Islam Malang	<1%
16	Internet	pdfcoffee.com	<1%
17	Internet	penerbitadm.pubmedia.id	<1%
18	Internet	eprints.uny.ac.id	<1%
19	Student papers	Sriwijaya University	<1%
20	Internet	qemsjournal.org	<1%
21	Internet	www.dictio.id	<1%
22	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
23	Internet	riau.bpk.go.id	<1%
24	Internet	prosenama.upnjatim.ac.id	<1%
25	Student papers	Fakultas Hukum Universitas Lampung	<1%

26	Internet	repository.unair.ac.id	<1%
27	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
28	Internet	repository.radenfatah.ac.id	<1%
29	Internet	jdih.bolselkab.go.id	<1%
30	Internet	repository.poltekkes-kdi.ac.id	<1%
31	Internet	simkesnas.stikesbuleleng.ac.id	<1%
32	Internet	banten.bpk.go.id	<1%
33	Internet	jdih.probolinggakab.go.id	<1%
34	Internet	jdih.bantaengkab.go.id	<1%

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN SITUBONDO KABUPATEN SITUBONDO

Nia Agus Saputri^{1*)}, Nina Sa'idah Fitriyah²⁾, Hasan Muchtar Fauzi³⁾.

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

*Email@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Situbondo. *Stunting* menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pejabat terkait, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu informan utama yaitu Camat Situbondo Kabupaten Situbondo. Informasi pendukung pada peneliti ini terdiri 6 informan pendukung. Pengumpulan data terdiri dari observasi, Wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan data kualitatif dilakukan secara interaktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Implementasi Perbup No. 45 Tahun 2022 di Kabupaten Situbondo berjalan baik dengan pendekatan terpadu, sasaran tepat, dan dukungan lintas sektor. Fokus pada intervensi gizi spesifik dan sensitif didukung pembiayaan APBD dan pengawasan berjenjang. Namun, penguatan koordinasi dan evaluasi masih diperlukan untuk mencapai target penurunan stunting secara optimal. 2) Strategi penurunan stunting di Situbondo difokuskan pada intervensi gizi terintegrasi bagi kelompok rentan, bantuan sosial, dan penguatan ketahanan pangan keluarga, dengan pendekatan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. 3) Faktor pendukung dalam penurunan *stunting* yaitu terbitnya program SiBesti (Situbondo Bebas Stunting) dan Faktor penghambat Penurunan stunting dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman gizi, sanitasi buruk, dan koordinasi yang lemah, namun faktor pendukung oleh regulasi, komitmen pemerintah, anggaran memadai, dan keterlibatan lintas sektor. Kolaborasi dan intervensi terpadu menjadi kunci keberhasilan

Kata kunci : Implementasi, Percepatan, Penurunan, *Stunting*

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of Situbondo Regent Regulation Number 45 of 2022 concerning the Acceleration of Stunting Reduction in Situbondo Regency. Stunting is a problem because it is associated with an increased risk of morbidity and mortality, suboptimal brain development resulting in delayed motor development and stunted mental growth. The method used is qualitative research. Data collection techniques through in-depth interviews with relevant officials, field

observations, and document analysis. The research method used is Qualitative. Informants in this study were the main informant, namely the Head of Situbondo District, Situbondo Regency. Supporting information for this researcher consisted of 6 supporting informants. Data collection consisted of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques using qualitative data were carried out interactively. Based on the results of the study, 1) The implementation of Regent Regulation No. 45 of 2022 in Situbondo Regency is running well with an integrated approach, precise targets, and cross-sectoral support. The focus on specific and sensitive nutrition interventions is supported by APBD funding and tiered supervision. However, strengthening coordination and evaluation is still needed to achieve the target of optimal stunting reduction. 2) The stunting reduction strategy in Situbondo focuses on integrated nutrition interventions for vulnerable groups, social assistance, and strengthening family food security, with a targeted and sustainable approach. 3) Supporting factors in stunting reduction include the launch of the SiBesti (Situbondo Free from Stunting) program. Inhibiting factors include low nutritional understanding, poor sanitation, and weak coordination. Supporting factors include regulations, government commitment, adequate budgets, and cross-sector involvement. Collaboration and integrated interventions are key to success.

Keywords: Implementation, Acceleration, Reduction, Stunting

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya Kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi “ bahwa meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan komitmen global dan merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia, bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus menerus “.

Kabupaten Situbondo masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu masalah gizi yang menjadi perhatian utama saat ini adalah masih tingginya anak balita pendek. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksana Pencapaian *Transforming Our World : The 2023 Agenda for Sustainable Development. Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah upaya pembangunan berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan dunia dan melestarikan alam serta menjadi kerangka acuan pembangunan negara yang ada di Dunia Salah satu tujuannya adalah ketahanan pangan gizi yang baik. (Sukanti & Faidati, 2021)

Masalah anak pendek (*stunting*) merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi di dunia, khususnya di negara - negara miskin dan berkembang (Unicef, 2013). *Stunting* menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental. Penanganan kekurangan gizi pada tingkat global memerlukan upaya yang dimulai dari tingkat nasional masing - masing negara. Pendekatan tersebut dalam mengatasi

masalah gizi pada populasi domestik memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya global dalam mengatasi malnutrisi seperti yang direncanakan pada *Millenium Development Goals* (MDG) di awal tahun 2000 (Unicef, 2013).

Stunting merupakan dimana kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang lain pada umumnya (yang seusia) yang disebabkan kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin/bayi lahir, tetapi *stunting* baru nampak setelah anak berusia 2 tahun. Hal ini berdampak pada perkembangan otak anak di masa goldenperiod (0-3 tahun) yang disebabkan karena 80-90% jumlah seotak terbentuk sejak masa dalam kandungan usia 2 tahun.

Permasalahan *stunting* pada kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. *Stunting* dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). *Stunting* dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi juga mengancam perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan saat ini dan produktivitas anak di masa dewasanya.

Penyebabnya terjadinya *stunting* karena rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan kepada anak juga menjadi penyebab anak *stunting* apabila ibu tidak memberikan asupan gizi yang cukup baik. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak.

Terkait banyak penyebab *stunting*, antara lain faktor asupan gizi ibu dan anak, status kesehatan balita, ketahanan pangan, lingkungan sosial dan kesehatan, lingkungan pemukiman, kemiskinan, dan lain-lain (UNICEF, 2013; WHO, 2013). Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 Hari Pertama Kelahiran).

Faktor yang menyebabkan *stunting* terjadinya infeksi pada ibu, kehamilan remaja, gangguan mental pada ibu, jarak kelahiran anak yang pendek, dan hipertensi. Selain itu, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak.

Stunting memberikan dampak negatif yang di antaranya berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kemiskinan serta kesenjangan. Kekurangan gizi terjadi pada bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir tetapi tampak setelah anak berusia dua tahun. Anak yang kekurangan gizi selain disebabkan infeksi penyakit, baik menular, maupun tidak menular, kemudian sanitasi yang buruk, ketersediaan air minum yang layak, serta pola asuh keluarga. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan. “(Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022)”

Penanggulangan *stunting* perlu tanggung jawab bersama, baik dari pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri yang membutuhkan upaya yang bersifat holistic dan saling terintegrasi. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 merupakan salah satu strategi dalam *Scaling Up Nutrition* (SUN) dengan melibatkan berbagai sektor yang harus disikapi dengan koordinasi yang kuat baik di tingkat pusat sampai ke tingkat

daerah. Diseminasi informasi dan advokasi kepada stake holder dan pemangku kepentingan lain di berbagai lintas sektor pada tingkatan yang sama dan perlu dilakukan upaya pelatihan dan edukasi untuk jajaran struktural agar mampu menjelaskan dan melakukan pemberdayaan dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Selanjutnya, intervensi penting penguatan 1000 HPK yang menjadi bagian dari budaya di kehidupan sosial masyarakat, melakukan kursus singkat dalam pengetahuan dan pendidikan kepada ibu sebelum kehamilan atau sebelum menjadi pengantin (calon pengantin) sebagai bekal ibu dalam kehamilan untuk menjaga tumbuh kembang kognitif janin yang dimulai dari trimester pertama dalam pembentukannya (Aryastami, 2017).

Penurunan *stunting* pada tahun 2022 Kabupaten Situbondo fokus pada 10 desa dan 5 kecamatan diantaranya yakni Desa Saletreng, Gebangan, Landangan, di kecamatan Kapongan, kemudian, Desa Duwet, peleyan, Alas Malang di Kecamatan Panarukan, Desa Bloro Kecamatan Besuki, Desa Buduan Kecamatan Suboh, serta Desa Semambu, dan Kembang di Kecamatan Jatibanteng. karenanya adanya faktor yang mendukung seperti, Program Pemberdayaan Masyarakat, peningkatan akses ke Layanan Kesehatan dan dukungan pemerintah pusat.

Kabupaten Situbondo terpilih sebagai salah satu wilayah yang mendapatkan inventaris penanganan penurunan *stunting* pada tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan RI. Sementara secara akumulatif angka *stunting* di Kota Santri ini tercatat juga tinggi. Yakni berada pada angka 26,74 persen. "Angka *stunting* ini tinggi, secara komulatif tingkat Kabupaten 26,74. Dinkes membahas secara detail melalui Rembuk *stunting*. Bung Karno juga meminta agar Dana Desa (DD) turut diarahkan untuk penanganan kasus *stunting*. Namun memang perlu dikaji terlebih dulu, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). "Paling tidak diarahkan untuk untuk penanganan *stunting*. Khususnya bagi gizi buruk kaum dhaufa, barangkali desa menyediakan makanan yang memiliki gizi bernilai tinggi. Untuk perencanaan intervensi dari Kementerian Kesehatan RI.

Kabupaten Situbondo masuk dalam ke dalam sepuluh besar kabupaten prioritas dalam penanganan *stunting*, pasalnya dapat dilihat bahwa prevalensi *stunting* Kabupaten Situbondo yang masih cukup tinggi, Dengan adanya hal tersebut pemerintah kabupaten Situbondo terus menggencarkan program - program dalam upaya penurunan *stunting*. Hal dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Di pasal 3 kebijakan tersebut, disebutkan bahwa penurunan *stunting* bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, dalam implementasi penanggulangan *stunting* tersebut juga dibentuk penguatan kelembagaan dan kerja sama yang tidak hanya dapat dilakukan secara sectoral akan tetapi membutuhkan kerjasama dan dukungan dengan sektor dan program lain dalam hal ini kerjasama antara pemerintah pusat sampai ke pemerintah Desa di Kabupaten Situbondo tersebut.

Dalam rangka percepatan penurunan *stunting* Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo selaku pengemban di bidang kesehatan melalui program Gesit Gembira menerbitkan SK Nomor 440/021.5/431.302. 2.2/2002 tentang Standar Pelayanan Gesit Gembira sebagai pedoman pelaksana program. Implementasi Program Rumah Pemulihan Gizi gerak membagi makanan bersama. Dalam percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo sudah berjalan dengan baik dan dilaksanakan terhadap beberapa permasalahan mulai dari belum terjangkaunya sasaran yang berada di beberapa wilayah yang jauh dari Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, kurangnya tim pelaksana/tenaga ahli, waktu pelaksana yang

kurang efektif, penyediaan jenis makanan halus untuk balita di bawah usia 1 tahun, dan beberapa orang tua pasien yang bersikap koperatif.

Upaya untuk mengatasi masalah *stunting* adalah inovasi di bidang gizi yang dilakukan oleh desa. Program inovasi itu mempunyai tujuan utama menekankan angka *stunting* dengan kelompok sasaran berisiko *stunting* yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan balita. Dengan adanya inovasi di bidang gizi, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku ibu hamil, ibu menyusui, serta ibu balita.

Berdasarkan data Kabupaten Situbondo termasuk dalam kategori Kota Prioritas Lokasi Intervensi Stunting, dengan prevelensi stunting 30,9% pada tahun 2022 namun terjadi penurunan yang signifikan menjadi 4,1% pada tahun 2023 Kabupaten Situbondo terpilih sebagai wilayah yang mendapat intervensi penanganan stunting dari Kementerian Kesehatan RI.

Adapun beberapa desa yang termasuk desa prioritas di kabupaten situbondo seperti desa Seletreng, Gebangan dan Landangan, 3 desa ini termasuk dalam desa prioritas yang mendapatkan intervensi, kabupaten situbondo dinobatkan sebagai kabupaten dengan penurunan prevelensi stunting terendah ketiga tingkat nasional di tahun 2024. Dinkes situbondo menekankan upaya penurunan angka stunting tetap di angka 4,1% , kategori stunting terdapat 2 yakni, stunted (anak balita dengan nilai z-score kurang dari -2.00 Stndar Deviasi) dan severely stunted (anak yang z-score-nya kurang dari -3.00 Stndar Deviasi).

Percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Situbondo Tahun 2022 - 2024 tampak menurun secara bertahap setiap tahunnya. Berdasarkan hasil analisis situasi program yang menjadi prioritas untuk mendapatkan intervensi penurunan *stunting* sebagai dasar perencanaan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Situbondo, menunjukkan pendekatan yang terstruktur dan terencana dalam mengatasi masalah *stunting* di Kabupaten Situbondo. Dengan adanya program ini kemungkinan berbagai strategi seperti peningkatan akses ke pangan bergizi, pendidikan nutrisistruktur kesehatan, dan kerjasama dengan pihak untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas.

Selain itu untuk mengatasi masalah *stunting* diperlukan pendekakatan holistik yang melibatkan berbagai pihak yang mengatakan bahwa masih terdapat kekurangan dan kesenjangan masalah kesehatan yang makin kompleks di setiap desa/kecamatan seperti belum efektifnya program-program pencegahan stunting dan belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi dan sensitif di semua tingkatan engan adanya kekurangan dalam hal program penurunan *stunting* memicu kurang maksimalnya target yang diinginkan pemerintah dalam program tersebut.

Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa kendala yang terjadi di lapangan seperti belum efektifnya program - program pencegahan *stunting* dan belum optimalnya koordinasi penyelenggara intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan. Buktinya masih banyak desa yang menunjukkan angka stunting cukup tinggi, kurangnya tenaga kesehatan terlatih di lapangan, minimnya pemahaman masyarakat tentang pola makan sehat, serta terbatasnya monitoring dan evaluasi program secara berkala. Selain itu, pelaksanaan intervensi yang tidak merata dan terbatasnya anggaran juga menjadi faktor yang memperlambat pencapaian target pemerintah dalam menurunkan angka stunting secara signifikan.

Sehubungan dengan hal tersebut upaya strategis perlu dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut terutama dalam penyelenggara pembangunan kesehatan yang haru didukung oleh kerja sama dengan semangat kemitraan antar semua pelaku pembangunan hingga di tingkat desa dengan interaksi, dan keterpaduan berbagai

upaya yang dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **"Implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo"**

METODE PENELITIAN

Rancangan Kegiatan

Jenis Penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah suatu metode yang digunakan dalam penelitian berdasarkan pada sebuah perbaikan yang ingin dilakukan yang kemudian diterapkan untuk melakukan penelitian pada kondisi lingkungan terjadinya sebuah masalah dan peneliti sebagai instrumen kunci. Hal ini sejalan dengan pendapat Bagdan dan Taylor dalam Moleong (2008: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan yaitu di Kecamatan Situbondo Situbondo yang terletak di Jl. WR. Supratman No.03, Karangasem, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312. Waktu dalam penelitian selama kurang lebih 5 bulan dimulai dari tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 30 Mei 2025.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Observasi menurut Menurut Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono, 2018:145) suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara adalah proses-proses ingatan pengamatan. Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dari pengamatan, akan mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi/keterangan Syaodih, 2013: 220). Hal ini dilakukan kepada informen kunci atau informan tambahan dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu, sehingga waktu atau tempatnya disepakati bersama.

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui proses tanya jawab. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari Responden yang terkait. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan narasumber, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

Dokumentasi merupakan pelengkap dalam pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian percaya bila ada dokumen pendukung dari proses penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data penting tentang hal - hal yang berkaitan dengan penelitian yang bersifat dokumentar seperti letak geografis, gambar - gambar dll.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Balita pendek (*Stunting*) adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. *Stunting* dapat terjadi mulai janin dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. (Eko Putro sandjojo,2017).

Teknik Analisis Data

Administrasi publik adalah proses kerjasama untuk memformulasikan dan menjalankan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan, baik untuk kepentingan pemerintah ataupun kepentingan publik. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data. Seperti dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) bahwa analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: Pengumpulan Data, Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo masuk dalam ke dalam sepuluh besar kabupaten prioritas dalam penanganan *stunting*, pasalnya dapat dilihat bahwa prevelensi *stunting* Kabupaten Situbondo yang masih cukup tinggi, Dengan adanya hal tersebut pemerintah kabupaten Situbondo terus menggencarkan program - program dalam upaya penurunan *stunting*. Hal dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Bupati dalam penurunan *stunting* yaitu:

1. Sasaran

Sasaran dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2016). Program Percepatan Pencegahan *Stunting* merupakan program prioritas pemerintah yang didukung oleh pimpinan pemerintah pusat, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan pemerintah desa. Bahkan ada 23 Kementerian/Lembaga yang dikerahkan untuk berkolaborasi dalam pencegahan *stunting*. Masing-masing Kementerian/Lembaga diharapkan dapat saling berkoordinasi dan berkonsolidasi pada tugas dan fungsinya masing-masing dengan tujuan yang sama yaitu untuk mendukung pencegahan *stunting*.

Dapat disimpulkan bahwa Prioritas utama atau sasaran dari program pencegahan *stunting* adalah Ibu hamil dan anak-anak usia 0-2 tahun atau rumah tangga dengan seribu hari pertama kelahiran. Ini karena kebutuhan akan kecukupan gizi bagi anak-anak adalah sejak masa kehamilan. Sehingga sejak masa kehamilan tersebut, harus dipastikan kondisi kesehatan dan kecukupan nutrisi bagi ibu hamil dan anak dalam kandungannya. Pemantauan kesehatan dan kecukupan gizi ini harus terus dilakukan sampai anak minimal memasuki usia dua tahun, usia lima tahun bahkan sampai dengan menginjak usia remaja. Karena pada masa tersebut sedang terjadi masa pertumbuhan, dimana sangat memerlukan asupan gizi yang memadai. Hal tersebut sesuai dengan program prioritas yang terdiri dari intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif yang telah diatur di Perbub No. 45 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Paparan diatas sangat berkaitan dengan berkaitan dengan teori

Grindle. Pernyataan Anda mencerminkan bahwa kebijakan penurunan stunting tidak hanya soal merumuskan program (isi), tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dalam tindakan nyata di lapangan (konteks implementasi), sesuai dengan kerangka dari teori implementasi kebijakan Grindle.

2. Kegiatan

Kegiatan percepatan penurunan *stunting* melalui intervensi spesifik meliputi pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Rematri, pemeriksaan kesehatan dan status gizi dan spesifik meliputi pemeriksaan kesehatan calon pengantin, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD), pelaksanaan screening imunisasi tetanus toksoid (TT) serta pemberian imunisasi tetanus toksoid (TT) wanita usia subur (WUS). Dalam kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran pasangan usia subur (PUS) dengan pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan KB pada pasangan usia subur (PUS) anemia, lila, penyakit kronis, infeksi menular seksual (ALKI) dan 4 T (terlalu mudah, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak).

3. Strategi pendekatan

Strategi pendekatan merupakan kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan (Agustino, 2016). Tujuan yang ingin dicapai dalam percepatan penurunan *stunting* adalah mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun yang harus dicapai sebesar 14 % (empat belas persen) pada tahun 2024. Strategi untuk percepatan penurunan *stunting* perdesaan, disusun untuk menetapkan program-program dan intervensi kegiatan dengan fokus pada pencegahan dan penanganan gizi buruk dan kronis balita dan ibu perdesaan agar tidak berlanjut menjadi kejadian *stunting* perdesaan. Mengacu kepada teori dan penelitian terdahulu, telah diidentifikasi faktor yang berpengaruh menyebabkan terjadinya *stunting*.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya penurunan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga. Edukasi kesehatan dan gizi berkaitan dengan upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga. Penyuluhan dengan kemandirian keluarga melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi. Edukasi pentingnya kemandirian keluarga yang meliputi tingkat kesadaran pentingnya kesehatan dan gizi, tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan dan gizi, upaya mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi dan pemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

4. Pembiayaan

Wulandari (2017) tentang analisis kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa menyatakan bahwa aparat pemerintah desa tidak cukup jika hanya dibekali oleh pengalaman tanpa pengetahuan dan pendidikan yang baik untuk menyelesaikan program desa, termasuk masalah kesehatan seperti *Stunting*

APBN memuat anggaran percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi

dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor. Sumber pembiayaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa Program percepatan penurunan stunting di daerah ini mendapatkan suntikan dana yang signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang mengatur tentang pembiayaan dan pendanaan terkait intervensi penurunan stunting di Indonesia. Alokasi dana APBD tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Dana APBD yang dialokasikan digunakan untuk berbagai kegiatan strategis dalam percepatan penurunan stunting. Beberapa di antaranya meliputi, penyediaan makanan tambahan bergizi bagi ibu hamil dan balita, pelaksanaan edukasi dan pelatihan gizi kepada masyarakat, pengembangan program pemantauan dan penimbangan berat badan balita secara berkala, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, dana APBD juga digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan stunting, seperti penyediaan sarana dan prasarana pendukung, pelatihan kader kesehatan, dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan demikian, alokasi dana APBD untuk percepatan penurunan stunting menjadi instrumen penting dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan produktif ..

5. Pembinaan dan pengawasan

Dari hasil wawancara diatas petugas posyandu menatakan bahwa bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengikutsertakan Masyarakat karena Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan memiliki peran penting untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitasnya adalah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses tersebut. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti pelibatan dalam perencanaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap kebijakan yang ada. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan tercipta transparansi, akuntabilitas, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga hasil pembinaan dan pengawasan dapat lebih dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Strategi Dinas Kesehatan dalam Penurunan *Stunting* Kabupaten Situbondo

Strategi penurunan stunting berdasarkan World Health Organization (WHO), 2021 mencakup intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik bertujuan mengatasi penyebab langsung seperti kurang gizi, sementara intervensi sensitif menangani faktor faktor tidak langsung yang mempengaruhi gizi, seperti sanitasi, air bersih, dan ekonomi masyarakat.

1. Pelaksanaan dalam teknis intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 HPK.

Wawancara diatas dapat dipaparkan bahwa Pelaksanaan kelas ibu hamil merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu hamil mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan pemeriksaan ANC (Antenatal Care). Kementerian Kesehatan RI. (2021) Program ini dilakukan melalui sosialisasi yang melibatkan pendekatan ekohort, di mana data dan informasi terkait kesehatan ibu

hamil dibagikan secara terstruktur untuk memfasilitasi pelaporan dan pertukaran informasi antar sesama. Dengan pendekatan ini, ibu hamil dapat lebih memahami peran pemeriksaan rutin dan pemenuhan gizi dalam menjaga kesehatan selama kehamilan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko komplikasi kehamilan dan meningkatkan kualitas hidup ibu dan bayi.

Wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa petugas posyandu telah berhasil memberikan tablet tambah darah (TTD) kepada ibu hamil sebagai bagian dari upaya pencegahan anemia selama kehamilan. Selain itu, kami juga aktif berkolaborasi dengan pihak puskesmas untuk melaksanakan penyuluhan kepada ibu hamil terkait pentingnya kesehatan ibu dan janin, serta cara-cara menjaga kesehatannya selama masa kehamilan. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai pentingnya konsumsi TTD dan pemantauan kesehatan secara berkala berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Dari pernyataan informan pendukung di atas dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan pernyataan informan pendukung di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program intervensi kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini diperkuat oleh seluruh pernyataan informan utama dan informan kunci yang mengkonfirmasi bahwa sosialisasi terkait program tersebut telah dilakukan secara intensif di lapangan. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam kepada masyarakat mengenai pentingnya intervensi yang tepat pada periode 1.000 HPK, sebagai upaya untuk memastikan tumbuh kembang anak yang optimal. Oleh karena itu, keberhasilan program ini dapat dilihat dari tingginya tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program intervensi tersebut.

2. Pelaksanaan kegiatan intervensi kegiatan gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur 7- 23 bulan tentang pemberian MP- ASI

Wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program MP-ASI (Makanan Pendamping ASI) bagi bayi usia 7-23 bulan telah dilaksanakan dengan memberikan PMT (Paket Makanan Tambahan) berupa susu kepada masyarakat yang memiliki balita stunting. menurut Kementerian Kesehatan RI Program ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan gizi balita, mencegah kekurangan gizi, dan membantu penurunan angka stunting di Indonesia. Pemberian susu sebagai PMT merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemulihan status gizi balita stunting, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif pada tumbuh kembang mereka.

Seperti yang dikatakan oleh ibu layli selaku petugas gizi Program intervensi gizi melalui pemberian makanan tambahan (PMT) dan pendirian Pos Gizi telah berhasil dilaksanakan sebagai upaya untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan status gizi balita. PMT diberikan secara rutin dengan menu bergizi seimbang, disesuaikan dengan kebutuhan anak. Kegiatan ini dilengkapi dengan edukasi kepada orang tua dan pemantauan pertumbuhan anak di Pos Gizi. Dukungan dari kader kesehatan, puskesmas, dan masyarakat berperan penting dalam keberhasilan program ini Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita*. Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat.

Berdasarkan pernyataan informan utama diatas diketahui bahwa pelaksanaan program intervensi kegiatan gizi spesifik yang menasar ibu menyusui dan anak berusia 7-23 bulan terkait pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) telah berjalan sesuai dengan rencana. Program ini telah direalisasikan melalui kegiatan pemberian makanan tambahan yang bergizi serta pelaksanaan pos gizi di lapangan.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak balita, khususnya dalam masa transisi dari ASI eksklusif ke MP-ASI, guna mencegah terjadinya masalah gizi seperti stunting dan gizi kurang. Keberadaan pos gizi di lingkungan masyarakat juga berfungsi sebagai wadah edukasi dan pemantauan tumbuh kembang anak, serta tempat konsultasi bagi ibu menyusui terkait praktik pemberian MP-ASI yang tepat dan sesuai dengan anjuran gizi seimbang.

3. Pelaksanaan dalam penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang memiliki balita stunting

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa bantuan untuk anak stunting, seperti pemberian makanan tambahan (PMT), merupakan langkah penting dalam menangani masalah gizi. Namun, untuk jaminan sosial, seperti bantuan kesehatan atau jaminan sosial lainnya, itu bukan ranah puskesmas. Puskesmas lebih fokus pada pelayanan kesehatan dasar, termasuk penanganan gizi buruk dan stunting. Jaminan sosial umumnya ditangani oleh lembaga pemerintah terkait seperti BPJS Kesehatan atau program-program bantuan sosial lainnya yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan prinsip pembagian tugas dalam sistem pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial di Indonesia berdasarkan *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan terkait jaminan sosial di Indonesia*.

Selaku petugas posyandu mengatakan bahwa anak yang stunting mendapatkan bantuan berupa BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan juga berperan penting dalam penanganan stunting dengan menyediakan layanan kesehatan bagi ibu hamil, persalinan, dan pasca persalinan. BPJS Kesehatan menanggung biaya pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan pelayanan kesehatan untuk bayi dan balita, termasuk skrining hipotiroid kongenital dan imunisasi rutin.

Pernyataan informan kunci diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program bantuan dan jaminan sosial bagi masyarakat dengan balita stunting telah dilaksanakan melalui kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan dinas sosial. Dalam program ini, BPJS Kesehatan diberikan langsung kepada keluarga dengan balita stunting sebagai upaya untuk memastikan akses kesehatan yang lebih baik. Kerja sama yang solid antara berbagai pihak ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

4. Pelaksanaan dalam peningkatan ketahanan pangan dan gizi keluarga

Mencakup hasil wawancara diatas Puskesmas telah melaksanakan pembentukan Pos Gizi di Posyandu sebagai upaya pencegahan dan penanganan stunting. Kegiatan ini meliputi edukasi kepada orang tua mengenai pola asuh yang baik, termasuk praktik pemberian makan bayi dan anak (PMBA), serta pembagian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita gizi kurang. Upaya ini sejalan dengan strategi nasional percepatan penurunan stunting yang menekankan intervensi spesifik di tingkat keluarga dan masyarakat menurut Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan gizi keluarga ada namanya pos gizi dengan kolaborasi bersama pihak puskesmas dan para kader. Pos Gizi merupakan salah satu upaya strategis dalam peningkatan gizi keluarga di tingkat masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara Puskesmas, kader Posyandu, dan masyarakat setempat. Pos Gizi berfungsi sebagai wadah edukasi, pemantauan pertumbuhan balita, serta pemberian makanan tambahan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam pelaksanaannya, Puskesmas memberikan pendampingan teknis dan medis, sementara kader Posyandu bertugas sebagai ujung tombak di lapangan dalam mengajak serta membina keluarga agar lebih peduli terhadap asupan

gizi anak.

Program ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan gizi buruk, sebagaimana diatur dalam *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi pada Anak Akibat Penyakit dan Kondisi Khusus*. Dengan adanya Pos Gizi, diharapkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang dapat meningkat secara berkelanjutan.

Faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo

1. Faktor Penghambat terjadinya *stunting*

Berdasarkan hasil penelitian faktor yang menjadi penyebab terjadinya *stunting* dikarenakan pola asuh orang tua yang masih belum baik, faktor ekonomi, dan faktor masih kurang taunya orang tua akan bahaya *stunting*. Stunting pada anak disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah pola asuh orang tua yang belum optimal, kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, serta kurangnya pemahaman orang tua tentang bahaya stunting. Pola asuh yang kurang tepat, seperti kurangnya pemberian gizi yang cukup dan stimulasi perkembangan, berkontribusi besar terhadap gangguan pertumbuhan anak.

Selain itu, faktor ekonomi yang rendah menyebabkan keterbatasan akses terhadap makanan bergizi dan pelayanan kesehatan. Kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan dampak jangka panjang stunting juga memperburuk situasi ini. Menurut penelitian, intervensi yang melibatkan peningkatan pengetahuan orang tua, akses kesehatan yang lebih baik, serta perbaikan ekonomi sangat diperlukan untuk mengurangi prevalensi stunting di Indonesia (Sumber: WHO, Kementerian Kesehatan RI).

Dapat dijelaskan bahwa stunting bukan hanya soal makanan, tetapi juga pola asuh. Pola asuh yang baik melibatkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang bergizi seimbang, serta perhatian terhadap kebersihan dan stimulasi mental anak. Berdasarkan Kementerian Kesehatan RI (<https://promkes.kemkes.go.id>), WHO (World Health Organization) orang tua perlu aktif memantau tumbuh kembang anak dan rutin memeriksakannya ke posyandu atau fasilitas kesehatan. Meski merasa pola asuh sudah benar, penting untuk terus belajar dari tenaga kesehatan agar pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan standar terbaru.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pemberian Air Susu Ibu (ASI) sebaiknya dilakukan secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi, dan dilanjutkan bersama makanan pendamping ASI (MP-ASI) hingga anak berusia 2 tahun atau lebih. Hal ini sesuai dengan anjuran dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa ASI memberikan manfaat gizi, kekebalan tubuh, dan ikatan emosional yang penting bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, menyusui hingga usia 2,5 tahun masih tergolong baik dan memberikan manfaat positif bagi anak berdasarkan WHO. (2023) dan Kementerian Kesehatan RI. (2021).

2. Faktor Pendukung Penurunan *stunting*

Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, telah berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan melalui berbagai program inovatif. Pada tahun 2023, prevalensi stunting di daerah ini tercatat sebesar 4,1%, turun drastis dari 30,9% pada tahun 2022, menjadikannya salah satu yang terendah di Indonesia. Salah satu program unggulan adalah Si-Besti (Situbondo Bebas Stunting), yang merupakan sistem informasi berbasis

digital untuk memantau dan mengkoordinasikan intervensi lintas sektor secara real-time. Program ini melibatkan berbagai perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, dan lainnya, guna memastikan data yang akurat dan transparan serta meningkatkan efektivitas kebijakan penurunan stunting.

Sebelum adanya SiBesti, data terkait stunting tersebar di berbagai sektor dan sulit diakses oleh masyarakat maupun instansi terkait. Dengan hadirnya SiBesti, informasi seperti peta sebaran stunting, statistik, rencana kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), program kegiatan, rembuk stunting, serta dokumentasi kegiatan dapat diakses secara terbuka melalui situs resmi sibesti.situbondokab.go.id

Inovasi ini juga mendukung konvergensi lintas sektor dalam penanganan stunting, meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, serta mempermudah perumusan kebijakan dan evaluasi program. Sebagai contoh, berdasarkan data Survey Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Situbondo tercatat sebesar 4,1%, menurun signifikan dari tahun sebelumnya dan menjadikannya salah satu yang terbaik di Jawa Timur.

Dapat dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) setempat menyalurkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 4.576 anak usia dini di 17 kecamatan. Program ini bertujuan meningkatkan status gizi anak-anak untuk mendukung pertumbuhan optimal dan menurunkan angka stunting. PMT yang diberikan meliputi susu, telur, dan makanan ringan sehat berdasarkan website Pemkab Situbondo.

Dapat dijelaskan bahwa makanan sehat sangat penting untuk mendukung pertumbuhan, menjaga daya tahan tubuh, dan mencegah berbagai penyakit. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral membantu tubuh bekerja optimal. Anak-anak, ibu hamil, dan lansia sangat dianjurkan memperhatikan asupan gizi agar tumbuh kembang dan kesehatan tetap terjaga. Hindari makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh, serta perbanyak sayur, buah, dan air putih berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (gizi.kemkes.go.id), Pedoman Gizi Seimbang.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan Program Gesit Gembira (RPG Gerak Membagi Makanan Bersama) merupakan inisiatif Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dalam rangka meningkatkan status gizi balita melalui pendekatan yang holistik. Tidak hanya sebatas pemberian makanan bergizi kepada balita peserta Rumah Pemulihan Gizi (RPG), program ini juga mencakup pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak serta edukasi gizi dan kesehatan kepada orang tua. Dengan pendekatan ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran keluarga akan pentingnya pola asuh dan pola makan yang sehat, guna menekan angka gizi buruk secara berkelanjutan berdasarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo 2025.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa program Gesit Gembira (RPG Gerak Membagi Makanan Bersama) adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh RPG Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian makanan bergizi kepada balita yang menjadi pasien RPG, tetapi juga mencakup upaya pemantauan terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita. Hal yang lebih penting lagi, program ini memberikan edukasi gizi dan kesehatan kepada orang tua pasien, dengan tujuan agar mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam merawat dan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

Implementasi Perbup No. 45 Tahun 2022 di Kabupaten Situbondo berjalan baik dengan pendekatan terpadu, sasaran tepat, dan dukungan lintas sektor. Fokus pada intervensi gizi spesifik dan sensitif didukung pembiayaan APBD dan pengawasan berjenjang. Namun, penguatan koordinasi dan evaluasi masih diperlukan untuk mencapai target penurunan stunting secara optimal. Strategi penurunan stunting di Situbondo difokuskan pada intervensi gizi terintegrasi bagi kelompok rentan, bantuan sosial, dan penguatan ketahanan pangan keluarga, dengan pendekatan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Faktor pendukung dalam penurunan stunting yaitu terbitnya program SiBesti (Situbondo Bebas Stunting) merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menyediakan pusat data terintegrasi terkait intervensi sensitif dan spesifik guna penanganan stunting. Faktor penghambat Penurunan stunting dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman gizi, sanitasi buruk, dan koordinasi yang lemah, namun faktor pendukung oleh regulasi, komitmen pemerintah, anggaran memadai, dan keterlibatan lintas sektor. Kolaborasi dan intervensi terpadu menjadi kunci keberhasilan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo diharapkan dapat meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat edukasi gizi kepada masyarakat, serta mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi program penurunan stunting secara berkala agar intervensi yang dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara terpadu guna memperoleh data yang lebih komprehensif terkait faktor penyebab serta efektivitas intervensi penurunan stunting

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada cinta pertama dan panutan Ayahanda Anwari dan pintu surgaku Ibunda Alm. Susriyati. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus diberikan. Mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Kakakku tersayang Ria yulian saputri dan tanteku tercinta Maisaroh yang selalu menjadi inspirasi dan sumber kekuatan dalam setiap langkahku.

Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S,Sos., M Si, Selaku Selaku Pembimbing Anggota dan Dr. Nina Sa'idah Fitriyah, S,Sos., M Si, Selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

REFERENSI

Buku :

Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Pencegahan dan*

- Penanganan Stunting. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- UNICEF.(2013). Improving Child Nutrition: The Achievable Imprative for Global Progres. New York: UNICEF
- Shrimpton, R., & Rokx, C. (2012). The Double Burden of Malnutrition in Indonesia. Washington, DC: The Wold Bank.
- Victora, C. G., a tal. (2015). Ending Preventable Child Deaths : A Global Action Agenda. Geneva: WHO.
- Rantung, M. I. R. (2024). Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model). *Penerbit Tahta Media*.
- RI, K. (2016). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. *Pedoman Umum Gizi Seimbang*. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
- World Health Organization. (2014). Global Nutrition Targets 2025: Stunting Polity Brief. Gevena: WHO.

Jurnal Ilmiah :

- Amaliyah, Kholishotu, et al. "Ayat-ayat administrasi publik dalam Al-Qur'an." (2022).
- Ariyani, E. D., Sadikin, S., & Muhammad, A. (2023). Survei Kepuasan Masyarakat Sebagai Tolok Ukur Keberhasilan Implementasi Pelayanan Publik Dalam Mencapai Good Governance Di Politeknik Manufaktur Bandung. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 322-330.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Al Jose, S.P., & Haryati, E. (2024). *Evaluasi Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Situbondo*. Soetomo Magister Ilmu Administrasi, 2(1), 35-44
- Azhar, M., & Satriawan, D. A. (2018). Implementasi kebijakan energi baru dan energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi nasional. 1(4), 398-412.
- Black., R. E., et al. (2013). "Maternal and Child UndeRnutrition and Overweight in Low-Income and Middle-Income Contries." *The Lancet*, 382(9890), 472-451.
- De Onis, M., & Branca, F. (2016). Childhood stunting: a global perspective. *Maternal & child nutrition*, 12, 12-26.
- Feis, I. (2009). Implementasi kebijakan: perspektif, model dan kriteria pengukurannya. *Gema Eksos*, 5(1), 218199.
- HIMYATUL, W. (2025). *Implemetasi Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Percepata Penurunan Stunting Di Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO).
- Kamasan, I. W., Raka, A. G., & Sumada, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis AkruaI Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 39-46.
- Lailiyah, Kusroh. "Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

- (BKKBN) Dalam Percepatan Penurunan Stunting Perspektif Perpres Nomor 72 Tahun 2021." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 4.1 (2023): 16-33.
- Lestari, N. D. (2016). Analisis determinan gizi kurang pada balita di Kulon Progo, Yogyakarta. *IJNP (Indonesian Journal of Nursing Practices)*, 1(1), 15-21.
- Mitra, M. (2015). Stunting problems and interventions to prevent stunting (a Literature Review)., 2(6), 254-261.
- Nomor, U. U. (36). tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Paramashanti, B. A., & Benita, S. (2020). Early introduction of complementary food and childhood stunting were linked among children aged 6-23 months. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 17(1), 1-8.
- Pendergast, A. J., & Humprey, J. H (2014). "The stunting syndrome in Developing Countries." *Paediatrics and Internasional Child Heald*, 34(4), 250_256
- Putri, J. E., & Prabawati, I. (2023). *Implementasi Program Rumah Pemulihan Gizi Gerak Membagi Makanan Bersama (Gesit Gembira) dalam Percepatan Penurunan Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo*. *Publika*, 11(4), 2441-2454.
- Rahmanda, F., & Gurning, F. P. (2022). Analisis implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting terintegrasi dalam program gerakan 1000 HPK di puskesmas pagar jati. *PubHealth Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 18-27.
- RI, K. (2016). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Pedoman Umum Gizi Seimbang. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
- ROMPIS, I., LENGKONG, F., & TAMPI, G. (2022). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Upaya Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kapoya Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 8(116).
- Rafiudin, Muhamad, Leo Agustino, and Deden M. Haris. *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak*. Diss. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2016.
- Sukanti, S., & Faidati, N. (2021). Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Sleman. *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 91-113.
- Setyawati, V. A. V. (2018, February). Kajian stunting berdasarkan umur dan jenis kelamin di Kota Semarang. In *Prosiding University Research Colloquium* (pp. 834-838).
- Victora, C. G., et al. (2008). "Maternal and Child Undernutrition: Consequences for Adult Health and Human Capital." *The Lancet*, 371(9609), 340-265.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.
- Yanti, N. D., Betriana, F., & Kartika, I. R. (2020). Faktor Penyebab Stunting Pada Anak: Tinjauan Literatur. *Real In Nursing Journal*, 3(1), 1-10.

Artikel Online :

UNICEF Indonesia. (2021). "Pencegahan Stunting: Investasi Masa Depan Anak."
Diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia>